

**PERHITUNGAN RASIO ANGGARAN BELANJA SATUAN  
BRIMOB POLDA KALIMANTAN TIMUR**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar  
Sarjana Akuntansi



Oleh:

**PRANANDA PRATAMA  
NIM. 1601035181  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
SAMARINDA  
2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Perhitungan Rasio Anggaran Belanja Satuan Brimob  
Polda Kalimantan Timur

Nama Mahasiswa : Prananda Pratama

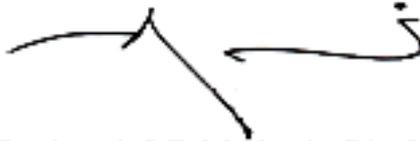
NIM : 1601035181

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : S1 – Akuntansi

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing,



Dwi Risma Deviyanti, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA  
NIP. 19701018 199512 2 001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. H. Syarifah Hudayah, M.Si  
NIP. 19620513 198811 2 001

Lulus Tanggal Ujian: 06 Juni 2023

## SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS

Judul Skripsi : Perhitungan Rasio Anggaran Belanja Satuan Brimob  
Polda Kalimantan Timur

Nama : Prananda Pratama

NIM : 1601035181

Hari : Selasa

Tanggal Ujian : 06 Juni 2023

### TIM PENGUJI

1. Dwi Risma Deviyanti, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CSRS.,CSRA  
NIP. 19701018 199512 2 001
2. Dr. H. Zaki Fakhroni, Ak., CA., CTA., CFrA., CIQaR  
NIP. 19801224 200801 1 006
3. Dr. Hj. Yana Ulfah, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CSRS.,CIQaR.,CSRA  
NIP. 19910607 201903 2 007



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prananda Pratama  
NIM : 1601035181  
Program Studi : S1 – Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan izin kepada pihak UPT Perpustakaan Universitas Mulawarman, Hak Bebas Royalti non-Eksklusif (*The Non-Exclusive Royalty – Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul “Perhitungan Rasio Anggaran Belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti non-Eksklusif ini kepada UPT Perpustakaan Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), memuat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Samarinda  
Tanggal : 22 Mei 2023  
Yang Menyatakan



Prananda Pratama

## ABSTRAK

Prananda Pratama. **Perhitungan Rasio Anggaran Belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur** (Dibimbing oleh Dwi Risma Deviyanti, SE., M.Si.,Ak.,CA).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis varians realisasi anggaran belanja, tingkat pertumbuhan realisasi anggaran belanja, keserasian realisasi anggaran belanja dan tingkat efisiensi penggunaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode tahun 2022-2026. Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif. Jenis penelitian menggunakan data sekunder. Untuk sumber data sekunder data yang dipublikasikan Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa varians realisasi anggaran belanja tahun 2017 tidak ada selisih, tahun 2018 sebesar Rp -2,661,438,000, tahun 2019 sebesar Rp -2,495,344,000, tahun 2020 sebesar Rp -101,741,00, dan tahun 2021 tidak ada selisih antara target anggaran belanja dengan realisasi belanja. Pertumbuhan realisasi anggaran belanja tahun 2017 sebesar 5,17%, tahun 2018 sebesar -6,32%, tahun 2019 menurun -7,61%, tahun 2020 meningkat -4,75% dan tahun 2021 meningkat 5,43%. Keserasian realisasi anggaran belanja berdasarkan analisis belanja operasi terhadap total belanja terus mengalami penurunan yakni pada tahun 2017 sebesar 97,7%, tahun 2018 menjadi 97,5%, tahun 2019 menjadi 97,3%, tahun 2020 menjadi 94,7% dan tahun 2021 menjadi 90,6%, sedangkan berdasarkan analisis belanja modal terhadap total belanja terus mengalami peningkatan yakni pada tahun 2017 sebesar 2,35%, tahun 2018 menjadi 2,48%, tahun 2019 menjadi 2,68%, tahun 2020 menjadi 5,33% dan tahun 2021 menjadi 9,38%. Efisiensi penggunaan anggaran belanja tahun 2017 sebesar 2,35% artinya efisien, tahun 2018 sebesar 2,48% artinya efisien, tahun 2019 sebesar 2,68% artinya efisien, tahun 2020 sebesar 5,33% artinya efisien dan tahun 2021 sebesar 9,38% artinya efisien.

**Kata Kunci :** Varians, Pertumbuhan, Keserasian, Efisiensi, Anggaran Belanja.

## ABSTRACT

Prananda Pratama. **Analysis of the Effectiveness and Efficiency of Budget Execution for the Mobile Brigade Unit of the East Kalimantan Police** (Supervised by Dwi Risma Deviyanti, SE., M.Si.,Ak.,CA).

*The purpose of this study was to find out and analyze the variance of budget realization, the growth rate of budget realization, the harmony of budget realization and the efficiency level of spending budget for the East Kalimantan Police Mobile Brigade Unit for the 2022-2026 period. This research method uses quantitative. This type of research uses secondary data. For secondary data sources, data published by the East Kalimantan Police Mobile Brigade Unit. The results of the study show that there is no difference in the variance of the realization of the 2017 expenditure budget, in 2018 it was IDR -2,661,438,000, in 2019 it was IDR -2,495,344,000, in 2020 it was IDR -101,741.00, and in 2021 there is no difference between the budget target and expenditure realization . The growth in realization of the 2017 expenditure budget was 5.17%, 2018 was -6.32%, 2019 decreased -7.61%, 2020 increased -4.75% and 2021 increased 5.43%. The harmony of the realization of the expenditure budget based on an analysis of operating expenses on total spending has continued to decrease, namely in 2017 it was 97.7%, in 2018 it became 97.5%, in 2019 it became 97.3%, in 2020 it became 94.7% and in 2021 to 90.6%, while based on an analysis of capital expenditures on total expenditure, it continued to increase, namely in 2017 by 2.35%, in 2018 it became 2.48%, in 2019 it became 2.68%, in 2020 it became 5.33% and in 2021 it will be 9.38%. Efficiency in the use of the 2017 expenditure budget of 2.35% means efficient, 2018 is 2.48% means efficient, 2019 is 2.68% means efficient, 2020 is 5.33% means efficient and in 2021 it is 9.38 % means efficient.*

**Keywords:** *Variance, Growth, Compatibility, Efficiency, Budget.*

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 22 Mei 2023

Mahasiswa



Prananda Pratama  
NIM. 1601035181

## RIWAYAT HIDUP

**Prananda Pratama** adalah sosok nama penulis penelitian ini. Penulis lahir di Samarinda (Kalimantan Timur) pada tanggal 24 September 1989 dari pasangan Bapak Ir. Zulkani dan Ibu Rumi Rosita sebagai anak pertama dari empat bersaudara. Penulis menempuh pendidikan formal dari SD Negeri 014 Samarinda (lulus tahun 2000), melanjutkan ke SLTP Negeri 6 Samarinda (lulus 2003), melanjutkan ke SMA Islam Samarinda (lulus 2006), kemudian pada tahun 2009 mengikuti Pendidikan Pembentukan Bintara Polri di Pusat Pendidikan (Pusdik) Brimob Watukosek Jattim dan menjadi Anggota polri di Satbrimob Polda Kaltim. Selain bertugas sebagai Anggota Kepolisian juga melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman dengan Program Studi Akuntansi.

Dengan motivasi yang tinggi untuk menyelesaikan kuliah ini, penulis terus belajar dan berusaha hingga akhirnya penulis pun bisa menyelesaikan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif pada dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas penyelesaian Skripsi yang berjudul “Perhitungan Rasio Anggaran Belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur.”

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, maka penulisan skripsi yang berjudul “Perhitungan Rasio Anggaran Belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur” telah selesai dilaksanakan. Semua kerja keras pasti membuahkan hasil yang baik bila dikerjakan dengan sungguh-sungguh.

Selama penulisan skripsi ini sudah banyak sekali pihak-pihak yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun lewat dukungan moral. Peneliti berterima kasih sekali kepada mereka semua. Semoga jasa-jasa baik ini bisa bermanfaat dikemudian hari. Dalam kesempatan ini pula peneliti ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada:

1. Ir.H.Abdunnur, M.Si selaku Rektor Universitas Mulawarman Samarinda.
2. Prof Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda.
3. Felisitas Defung, SE., MA., Ph.D selaku Wakil Dekan I Bidang akademik; Dr. H. Irwansyah, SE., MM selaku Wakil Dekan II Bidang Umum, Keuangan dan SDM; Dr. Zainal Abidin, SE., MM selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda.
4. Dwi Risma Deviyanti, SE., M.Si.,Ak.,CA.,CSRS.,CSRA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman

Samarinda sekaligus dosen Pembimbing yang telah memberikan saran dan petunjuk untuk mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini.

5. Dr. H. Zaki Fakhroni, Akt., CA.,CTA.,CFrA.,CIQaR selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda
6. Dosen penguji yang memberikan saran untuk perbaikan skripsi ini.
7. Keluarga yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Akademik yang telah memberikan bimbingan selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

Penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dengan terbuka penulis menerima masukan kritik dan saran guna perbaikan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini berguna bagi kita semua.

Samarinda, 22 Mei 2023



Prananda Pratama

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN IDENTITAS PENGUJI SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	7
2.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).....	7
2.1.1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	8
2.1.2. Pengertian Anggaran.....	10
2.1.3. Belanja Negara .....	13
2.1.4. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).....	14
2.1.5. Tujuan APBN .....	15
2.1.7. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .....	15
2.2. Kinerja Keuangan .....	17
2.2.1. Pengertian Kinerja Keuangan .....	17
2.2.2. Indikator Kinerja Keuangan .....	18
2.2.3. Analisis Kinerja Keuangan .....	19
2.6. Penelitian Terdahulu .....	25
2.7. Kerangka Pikir Penelitian .....	27
BAB III METODE PENELITIAN .....	28
3.1. Definisi Operasional .....	28
3.2. Rincian Data Yang Diperlukan .....	29
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	30
3.4. Ruang Lingkup.....	30
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	30

3.6. Analisis Data .....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	35
4.1. Gambaran Umum.....	35
4.2. Hasil Penelitian dan Analisis .....	48
4.3. Pembahasan.....	40
BAB V PENUTUP .....	57
5.1. Simpulan .....	57
5.2. Saran .....	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Realisasi anggaran Belanja Per Jenis Belanja .....	4
Tabel 2.1 Kriteria Efektifitas .....	23
Tabel 2.2 Kriteria Efisiensi .....	24
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 3.1 Kriteria Efektifitas .....	31
Tabel 3.2 Kriteria Efisiensi .....	32
Tabel 3.3 Analisis Varians (Selisih) Anggaran Belanja .....	32

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian.....	27

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1 Data Penelitian.....	60

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu negara merupakan kebutuhan yang wajib dilaksanakan. Setiap institusi dalam negara bekerja dengan menggunakan seluruh potensi yang dimiliki dalam rangka mendukung upaya pembangunan negara dan bangsa yang lebih baik. Perwujudan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah negara, berlandaskan reformasi manajemen keuangan pemerintah. Reformasi tersebut mendapatkan landasan hukum yang kuat dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15/2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara.

Kemampuan dalam melaksanakan reformasi tersebut berupa sumber daya keuangan yang diberikan oleh negara kepada setiap intitusi dalam melaksanakan segala kegiatan organisasinya. Untuk itu, pencapaian tujuan negara selalu terkait dengan keuangan negara sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan negara. Keuangan negara sebagai perencanaan keuangan untuk suatu periode waktu tertentu. Anggaran belanja pemerintah sebagai suatu pernyataan mengenai pengeluaran atau belanja yang diusulkan dan penerimaan untuk masa mendatang bersama dengan data pengeluaran dan penerimaan yang sebenarnya untuk periode mendatang dan periode yang telah lampau. Sarana keuangan negara menjadi salah

satu instrumen pokok yang sangat penting dalam menggerakkan roda pemerintahan. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan tidak akan bisa dilaksanakan secara efektif tanpa didukung oleh sarana keuangan negara.

Keuangan negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran pada periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut. Keahlian di bidangnya masing-masing disebabkan karena penempatan pegawai sesuai dengan kemampuannya serta tingkat pendidikannya. Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kebijakan pengelolaan keuangan negara dilaksanakan sesuai asas-asas yang baik dalam pengelolaan keuangan negara yaitu asas kesatuan yaitu asas yang menghendaki semua pendapatan dan belanja negara/daerah disajikan dalam satu dokumen, asas universalitas yaitu asas yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran, asas tahunan yaitu asas yang menghendaki adanya batasan masa berlaku anggaran untuk satu tahun tertentu dan asas spesialisitas yaitu asas yang mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terperinci secara jelas peruntukannya.

Salah satu institusi negara yang difasilitasi oleh negara melalui kemampuan keuangan yang cukup memadai karena sangat besar perannya didalam negara adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang bertindak atas nama pemerintah dalam memberikan rasa aman, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat dan seluruh warga negara. POLRI merupakan

lembaga non departemen yang memiliki peran untuk mewujudkan keamanan dalam negeri Indonesia yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak manusia.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian adalah institusi yang melaksanakan tugas mewujudkan keamanan dalam negeri, meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Harapan masyarakat terhadap peran Kepolisian Negara Republik Indonesia pasca Reformasi 1998 sebagai alat negara penegak hukum, pewujud keamanan dan ketertiban masyarakat, serta sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat semakin tinggi.

Sebagai alat negara penegak hukum, POLRI diberi peranan dan fungsi yang sangat penting dalam memberikan kepastian dan keadilan dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. Meskipun reformasi birokrasi di tubuh POLRI telah dilaksanakan selama beberapa dekade terakhir ini, namun kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini relatif masih sangat rendah. Hal tersebut terjadi karena masih terdapatnya sejumlah kelemahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lembaga ini, khususnya pada reformasi SDM dan anggaran yang memegang bobot

tertinggi dari sejumlah reformasi yang tercakup dalam reformasi birokrasi. Kelemahan pelaksanaan reformasi SDM dan anggaran terlihat dari kelemahan kebijakan-kebijakan untuk pengembangan profesionalisme individu POLRI, sistem kepegawaian dan sistem karir maupun pengembangan organisasi POLRI.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Polri telah menyesuaikan sistem otorisasi perencanaan dan anggaran mengikuti *budget oriented*. Dalam hal ini POLRI harus memerinci dan merencanakan anggaran belanjanya menurut kebutuhan organisasi, fungsi dan jenis belanja. POLRI wajib menyusun rencana kerja berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Anggaran disusun berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan realisasinya dilaporkan dengan basis prestasi kinerja yang dicapai. Melalui pengawasan yang baik diharapkan akuntabilitas polisi akan lebih baik.

Studi pendahuluan pada Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur mengenai realisasi anggaran belanja per jenis belanja dapat dilihat tabel berikut :

**Tabel 1.1. Realisasi Anggaran Belanja Per Jenis Belanja**

<b>Tahun 2017</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Belanja Pegawai	83.937.270.000	83.864.626.692	99,91
Belanja Barang	4.839.025.000	4.837.142.700	99,96
Total	88.776.295.000	88.701.769.392	99,91
<b>Tahun 2018</b>			
Belanja Pegawai	85.215.332.000	86.160.905.228	101,11
Belanja Barang	4.824.009.000	4.823.960.290	99,99
Total	90.039.341.000	90.984.865.518	101,05
<b>Tahun 2019</b>			
Belanja Pegawai	78.564.139.000	73.125.150.513	93
Belanja Barang	4.657.915.000	4.657.890.400	99,99
Total	83.222.054.000	77.783.040.913	93,46

Sumber : Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur

Berdasarkan tabel 1.1. diketahui bahwa anggaran dan realisasi belanja tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017, namun mengalami penurunan di tahun 2019. Realisasi Belanja Satuan Brimob Polda Kaltim pada T.A. 2017 adalah sebesar Rp. 88.701.769.392,- atau 99,91 % dari pagu anggaran Satuan Brimob Polda Kaltim sebesar Rp. 88.776.295.000,-. Nilai realisasi belanja tersebut terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 83.864.626.692,- atau 99,91 % dari Pagu anggaran belanja pegawai Rp. 83.937.270.000,-, Belanja Barang sebesar Rp. 4.837.142.700,- atau 99,96 % persen dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.839.025.000,-

Realisasi Belanja Satuan Brimob Polda Kaltim pada T.A. 2018 adalah sebesar Rp. 90.984.865.518,- atau 101,05 % dari pagu anggaran Satuan Brimob Polda Kaltim sebesar Rp. 90.039.341.000,-. Nilai realisasi belanja tersebut terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 86.160.905.228,- atau 101,11 % dari Pagu anggaran belanja pegawai Rp. 85.215.332.000,-. Sedangkan nilai realisasi Belanja Barang sebesar Rp. 4.823.960.290,- atau 99,99 % persen dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.824.009.000,-. Pada tahun 2018 realisasi belanja melebihi anggaran dikarenakan pada akhir tahun 2018 personel Satuan Brimob Polda Kaltim terlibat kegiatan operasi aman nusa di DKI Jakarta.

Realisasi Belanja Satuan Brimob Polda Kaltim pada T.A. 2019 adalah sebesar Rp. 77.783.040.913,- atau 93,46 % dari pagu anggaran Satuan Brimob Polda Kaltim sebesar Rp. 83.222.054.000,-. Nilai realisasi belanja tersebut terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 73.125.150.513,- atau 93 % dari Pagu anggaran belanja pegawai Rp. 78.564.139.000,-. Sedangkan nilai realisasi Belanja Barang

sebesar Rp. 4.657.890.400,- atau 99,99 % persen dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.657.915.000,-

Dari uraian permasalahan, membuat dilakukan pengkajian tentang Perhitungan Rasio Anggaran Belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini berdasarkan permasalahan diatas :

1. Bagaimana varians realisasi anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021?
2. Bagaimana tingkat pertumbuhan realisasi anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021?
3. Bagaimana keserasian realisasi anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021?
4. Bagaimana tingkat efisiensi penggunaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakannya kajian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Varians realisasi anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021.
2. Tingkat pertumbuhan realisasi anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021.
3. Tingkat keserasian realisasi anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021.

4. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat untuk perlakuan penelitian diharapkan yaitu:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis memberikan informasi serta kajian lebih lanjut di bidang akuntansi tentang analisis efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur.

2. Manfaat praktis

Secara praktis memberikan suatu informasi pada Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur melalui analisis efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)**

##### **2.1.1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)**

UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa anggaran negara atau anggaran pendapatan dan belanja negara adalah suatu dokumen yang memuat perkiraan, penerimaan, dan pengeluaran serta perincian berbagai kegiatan di bidang pemerintahan negara yang berasal dari pemerintah untuk waktu satu tahun (Rachmat, 2018:139).

Anggaran tersebut merupakan batas tertinggi dari pengeluaran negara untuk melaksanakan tugas dan keperluan negara dan penerimaan negara yang diperkirakan dapat menutup pengeluaran dalam periode tertentu, agar tidak menimbulkan defisit anggaran. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi biaya dari kinerja pemerintah yang hendak dicapai dalam periode tertentu dimana anggaran tersebut harus dikonfirmasi kepada publik untuk diberi masukan dan kritik (Sony, 2017: 57)

Menurut Mahsun (2017:81), definisi anggaran pendapatan dan belanja negara adalah daftar yang memuat rincian penerimaan negara dan pengeluaran belanja negara selama satu tahun. APBN merupakan rencana kerja kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan beban yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran.

Mahsun (2017:81) juga menjelaskan semua penerimaan daerah dan pengeluaran negara harus dicatat dan dikelola dalam APBN, karena APBN merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam dalam satu anggaran. APBN merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Negara dan semua Belanja Negara dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua Pendapatan Negara dan semua Belanja Negara dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBN. APBN merupakan dasar pengelolaan keuangan negara, maka APBN menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan pengawasan keuangan negara. Tahun anggaran APBN sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, relisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

### **2.1.2. Pengertian Anggaran**

Mardiasmo (2018:61) mengemukakan pengertian anggaran merupakan “pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran”. Pengertian anggaran

menurut Needles (2014:102), “*Budgeting is the process of identifying, gathering, summarizing, and communicating financial and non financial information about an organization’s future activities.*” Pengertian anggaran menurut Needles (2014:102) ini berarti “Penganggaran adalah proses mengidentifikasi, mengumpulkan, meringkas, dan mengkomunikasikan informasi keuangan dan non keuangan tentang kegiatan masa depan organisasi”.

Peraturan Pemerintahan No. 71 Tahun 2010, menjelaskan bahwa anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah melalui rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Isi dari anggaran adalah rencana kegiatan dalam suatu periode yang direpresentasikan dalam bentuk rencana pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran berbentuk suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi sektor publik yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Bagi organisasi sektor publik seperti pemerintah, anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya.

Halim (2016:48) mengidentifikasikan bahwa anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama yaitu sebagai berikut:

1. Anggaran sebagai alat perencanaan

Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.

2. Anggaran sebagai alat pengendalian

Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (*overspending*), terlalu rendah (*underspending*), salah sasaran (*missappropriation*) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (*misspending*).

3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah, digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran sektor publik dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi

4. Anggaran sebagai alat politik

Anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.

5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Melalui dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan sub-organisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh bagian/ unit kerja lainnya.

#### 6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja

Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa hasil yang dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

#### 7. Anggaran sebagai alat motivasi

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang ditetapkan.

#### 8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik.

Masyarakat dan elemen masyarakat lainnya nonpemerintah, seperti LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Keagamaan, dan organisasi masyarakat lainnya, harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Keterlibatan mereka dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Keterlibatan langsung masyarakat dalam proses penganggaran dapat dilakukan mulai dari proses penyusunan perencanaan pembangunan maupun rencana kerja pemerintah (daerah), sedangkan keterlibatan secara tidak langsung dapat melalui perwakilan mereka di lembaga legislatif (DPR/DPRD)

### **2.1.3. Belanja Negara**

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 lampiran III belanja adalah “semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang

mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”.

Beberapa belanja yang diklasifikasikan menurut Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 lampiran III yaitu :

1. Klasifikasi Ekonomi merupakan pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas. Klasifikasi ini meliputi:
  - a. Belanja Operasi yaitu pengeluaran anggaran untuk sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka panjang.
  - b. Belanja Modal yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
  - c. Belanja Tidak Terguna yaitu pengaliran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak bias dan tidak diharapkan berulang seperti pengeluaran bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah Pusat/Daerah.
  - d. Transfer yaitu pengeluaran uang dari entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
2. Klasifikasi Organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi penggunaan anggaran.
3. Klasifikasi fungsi utama merupakan klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program

atau kegiatan, belanja pada setiap SKPD diklasifikasikan berdasarkan kelompok belanja yaitu :

- a. Belanja Langsung
- b. Belanja Tidak Langsung

#### **2.1.4. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)**

APBN yang didasarkan pada RKP akan diawali dengan, Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang akan menyusun pagu indikatif (Bambang, 2016:5). Kementerian Keuangan dan Bappenas akan menyusun dan menyampaikan daftar usulan kegiatan untuk anggaran rutin dan daftar usulan proyek yang telah disampaikan oleh tiap unit eselon untuk anggaran pembangunan. Daftar usulan kegiatan dan daftar usulan proyek yang telah disetujui oleh DPR inilah yang akan menjadi pagu indikatif, guna dijadikan dasar untuk menyusun Rancangan APBN (Rachmat, 2017:163).

Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditinjau dari kebijakan fiskal yaitu (Rachmat, 2017:163) :

1. Fungsi otoritas yaitu bahwa anggaran menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran menjadi pedoman bagi manajemen dalam, merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
6. Fungsi stabilitasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

#### **2.1.5. Tujuan APBN**

Setiap tahun pemerintah daerah menyusun APBN, Rachmat (2017:175) menyebutkan dasar hukum pelaksanaan anggaran belanja negara adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Keputusan Presiden Perincian Anggaran Rutin dan Pembangunan.
3. Daftar Isian Kegiatan (DIK) dan Daftar Isian Proyek (DIP) yang telah disahkan.
4. Keputusan Presiden mengenai Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pembahasan atas rancangan UU APBN telah selesai dan telah disetujui oleh DPR, maka selanjutnya Rancangan UU APBN akan ditandatangani oleh Presiden dan diundangkan dalam lembaran negara.

Rachmat (2017:155) berpendapat bahwa bentuk dan komposisi pokok APBN memiliki komponen yang jelas. APBN yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang terdiri atas dua komponen, yaitu:

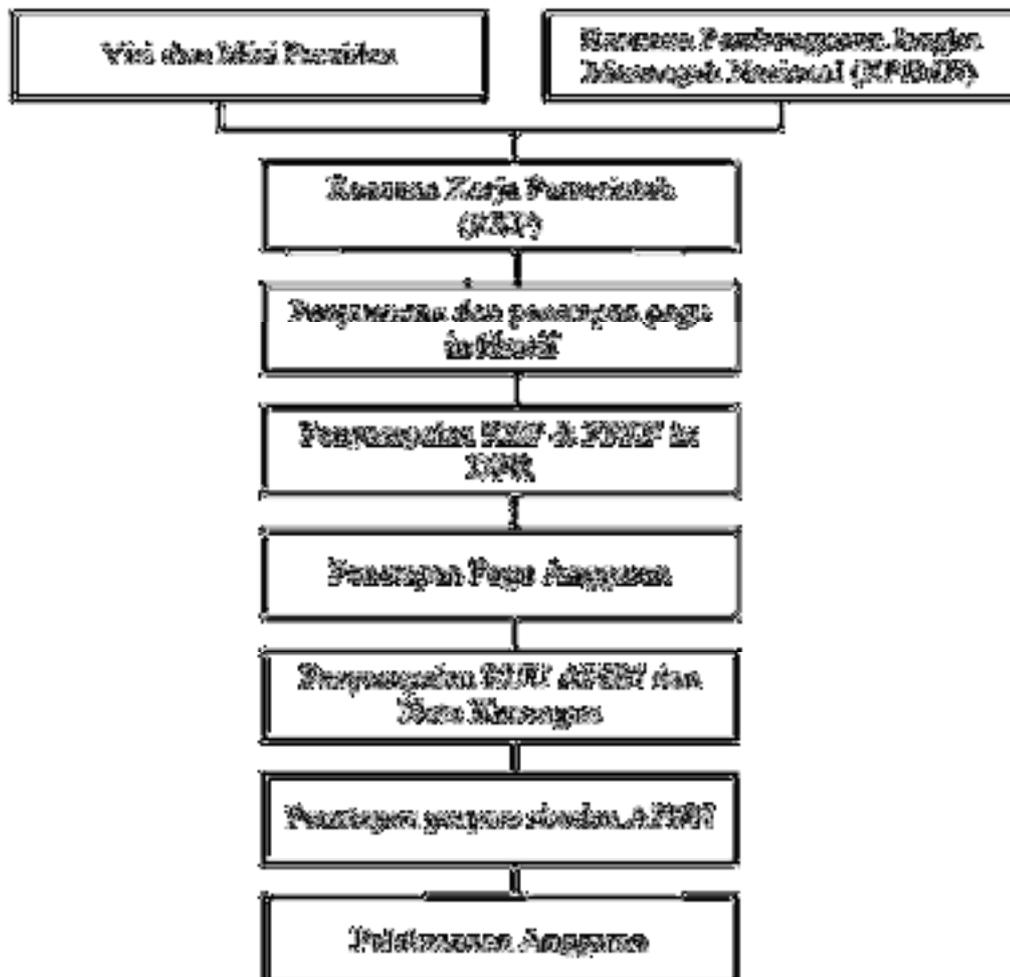
1. Anggaran pembangunan yaitu penerimaan dan belanja pembangunan.
2. Anggaran rutin yaitu penerimaan dan belanja rutin.

Anggaran pembangunan adalah bagian dari APBN yang terdiri atas anggaran penerimaan pembangunan yang berasal dari utang atau bantuan luar negeri. Sedangkan belanja pembangunan adalah pengeluaran pemerintah yang berbentuk investasi (proyek-proyek), baik berbentuk fisik maupun nonfisik (Rachmat, 2017:155).

#### **2.1.6. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**

UUD 1945 adalah dasar hukum yang tertinggi dalam struktur hukum di Indonesia. Oleh karena itu pengaturan mengenai keuangan negara selalu berdasarkan hukum ini, terutama dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Pasal Amandemen IV 23 mengatur anggaran negara (APBN). Anggaran merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah dan prioritas pembangunan secara umum. Anggaran fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua pendapatan dan pengeluaran benar bahwa tugas negara dalam tahun fiskal yang diberikan harus disertakan dalam anggaran.

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dilihat gambar berikut:



Gambar 2.1. Proses Penyusunan APBN

APBN yang didasarkan pada RKP akan diawali dengan, Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang akan menyusun pagu indikatif (Bambang, 2016: 5). Kementerian Keuangan dan Bappenas akan menyusun dan menyampaikan daftar usulan kegiatan untuk anggaran rutin dan daftar usulan proyek yang telah disampaikan oleh tiap unit eselon untuk anggaran pembangunan (Rachmat, 2017:163).

Daftar usulan kegiatan dan daftar usulan proyek yang telah disetujui oleh DPR inilah yang akan menjadi pagu indikatif, guna dijadikan dasar untuk menyusun Rancangan APBN. Selanjutnya, Kementerian Keuangan dan Bappenas akan menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) dan kerangka ekonomi makro (KEM) kepada DPR selambat-lambatnya pada pertengahan bulan Mei, yang akan membahas mengenai kebijakan umum dan prioritas anggaran, dari hasil pembahasan tersebut akan menjadi masukan untuk penyusunan APBN (Muindro, 2018: 47).

Setelah membahas mengenai PPKF dan KEM, selanjutnya Kementerian Keuangan akan menyusun penetapan rencana kerja dan anggaran (Bambang, 2016: 5). Pagu indikatif yang telah disetujui oleh DPR pada tahap pertama akan digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya, yang tentunya telah berisikan prestasi kerja yang akan dicapai dan perkiraan belanja untuk tahun berikutnya. Rencana kerja dan anggaran yang telah disusun, akan disampaikan kepada DPR yang nantinya akan menghasilkan pagu anggaran guna pendahuluan rancangan APBN. Hasil pembahasan tersebut akan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang APBN (Muindro, 2018: 47).

Pemerintah pusat akan mengajukan rancangan UU-APBN disertai dengan Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus (Muindro, 2013: 47). Pembahasan rancangan UU- APBN pada DPR dilakukan oleh Komisi APBN DPR yang anggotanya meliputi semua fraksi yang ada di DPR. Setelah pembahasan rancangan UU-APBN maka DPR dapat

menentukan apakah menolak atau menyetujui, dengan anggapan DPR telah menyetujui maka, rancangan UU-APBN akan dikembalikan untuk disahkan dengan ditandatangani Presiden dan selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Negara oleh Menteri Sekretaris Negara. Setelah selesai tahapan pembahasan dan pengesahan, tahapan pelaksanaan APBN dapat dimulai (Rachmat, 2017:173).

## **2.2. Kinerja Keuangan**

### **2.2.1. Pengertian Kinerja Keuangan**

Agustina (2013:3) dalam jurnalnya, kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya.

### **2.2.2. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan**

Tujuan pengukuran kinerja pengelolaan keuangan pemerintah menurut Mardiasmo (2018:121) adalah untuk memenuhi tiga maksud, yaitu :

1. Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberi pelayanan publik.
2. Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

### **2.2.3. Indikator Kinerja Keuangan**

Pengukuran kinerja pemerintah harus mencakup pengukuran kinerja keuangan, hal ini terkait dengan tujuan Pemerintah Daerah. Menurut Mahsun (2017:196) indikator kinerja keuangan daerah meliputi :

1. Indikator Masukan (*Inputs*), misalnya :
  - a. Jumlah dana yang dibutuhkan
  - b. Jumlah pegawai yang dibutuhkan
  - c. Jumlah infra struktur yang ada
  - d. Jumlah waktu yang digunakan.
2. Indikator Proses (*Proses*), misalnya :
  - a. Ketaatan pada peraturan perundangan
  - b. Rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.
3. Indikator Keluaran (*Output*), misalnya :
  - a. Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan
  - b. Ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.

4. Indikator Hasil (*Outcome*), misalnya :
  - a. Tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan
  - b. Produktivitas para karyawan atau pegawai.
5. Indikator Manfaat (*Benefit*), misalnya :
  - a. Tingkat kepuasan masyarakat
  - b. Tingkat partisipasi masyarakat.
6. Indikator *Impact*, misalnya :
  - a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat
  - b. Peningkatan pendapatan masyarakat.

#### **2.2.4. Analisis Kinerja Keuangan**

Menurut Mahsun (2017:135) analisis laporan keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBN belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kiadah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBN perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBN berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Halim 2015:4).

Analisis rasio keuangan APBN dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki

suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBN ini adalah sebagai berikut: pihak eksekutif, pemerintah pusat, serta masyarakat dan kreditor (Halim 2015:4).

Ada beberapa cara untuk menganalisis anggaran khususnya analisis belanja diantaranya yaitu :

### **1. Analisis Varians Belanja**

Analisis varians belanja merupakan analisis terhadap penelitian atau selisih antara realisasi belanja dengan yang dianggarkan. Analisis varians anggaran belanja dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi belanja dengan yang dianggarkan. Selisih realisasi belanja dengan yang dianggarkan yang cukup signifikan bisa memberikan dua kemungkinan, yang pertama menunjukkan adanya efisiensi anggaran dan kedua jika terjadi selisih kurang maka sangat mungkin telah terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga estimasi belanja kurang tepat, atau tidak terserapnya anggaran tersebut bisa jadi disebabkan karena ada program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan eksekutif padahal sudah diamanatkan dalam anggaran. Oleh karena itu, untuk mengetahui penyebab varians perlu dilakukan penelusuran sehingga bisa menilai apakah selisih tersebut menunjukkan kinerja anggaran yang baik atau hanya karena anggaran yang ditetapkan kurang efisien. Varians belanja dihitung dengan rumus berikut (Mahmudi, 2016:45) :

Varians Belanja = Realisasi Anggaran Belanja – Target Anggaran Belanja

## 2. Analisis Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negative (Mahmudi, 2016:138).

Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Halim 2015:241).

Rasio pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi instansi/daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi nilai Total Pendapatan dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa instansi/daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode berikutnya. Jika semakin tinggi nilai Total Pendapatan dan Belanja Operasi yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Modal, maka pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa instansi/daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan.

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ketahun. Pada umumnya belanja memiliki

kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Namun demikian pemerintah harus dapat mengendalikan belanja negara, melakukan efisiensi belanja dan penghematan anggaran. Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka menengah dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal negara. Pertumbuhan belanja dapat dihitung dengan rumus berikut (Mahmudi, 2016:35):

$$\text{Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}_{Th\ t} - \text{Realisasi Belanja}_{Th\ t-1}}{\text{Realisasi Belanja}_{Th\ t-1}} \times 100\%$$

### **3. Analisis Keserasian Belanja**

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antarbelanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi. Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja. Analisis keserasian belanja antara lain berupa :

- a. Analisis belanja per fungsi terhadap total belanja
- b. Analisis belanja operasi terhadap total belanja
- c. Analisis belanja modal terhadap total belanja
- d. Analisis belanja langsung dan tidak langsung

Pada penelitian ini dilihat dari analisis belanja operasi terhadap total belanja dan analisis belanja modal terhadap total belanja, yang dijelaskan berikut ini (Mahmudi, 2016:162-164):

a. Analisis belanja operasi terhadap total belanja

Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja operasi ini sifatnya jangka pendek dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah yaitu antara 60-90%. Rumusnya ditentukan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi Thd Total Belanja} = \frac{\text{Rasio Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

b. Analisis belanja modal terhadap total belanja

Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Berbeda dengan belanja operasi yang bersifat jangka pendek dan rutin, pengeluaran belanja modal yang dilakukan saat ini akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang. Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah adalah antara 5-20%. Rumusnya ditentukan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Modal Thd Total Belanja} = \frac{\text{Rasio Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

#### 4. Analisis Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi berarti kinerja keuangan semakin baik. Untuk itu pemerintah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya (Halim, 2015:234). Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut (Mahmudi, 2016:39) :

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

**Tabel 2.1. Kriteria Efisiensi**

<b>Kriteria Efisiensi</b>	<b>Persentase Efisiensi</b>
Tidak efisien	100% ke atas
Efisien berimbang	100%
Efisien	Kurang dari 100%

Sumber : (Mahsun, 2017:187)

## 5. Analisis Rasio Belanja Daerah Terhadap PDRB

Rasio belanja daerah terhadap PDRB merupakan perbandingan antara total belanja daerah dengan PDRB yang dihasilkan daerah. Rasio ini menunjukkan produktivitas belanja daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Daerah Thd PDRB} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total PDRB}}$$

### 2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam rangka mendukung penelitian ini, meliputi:

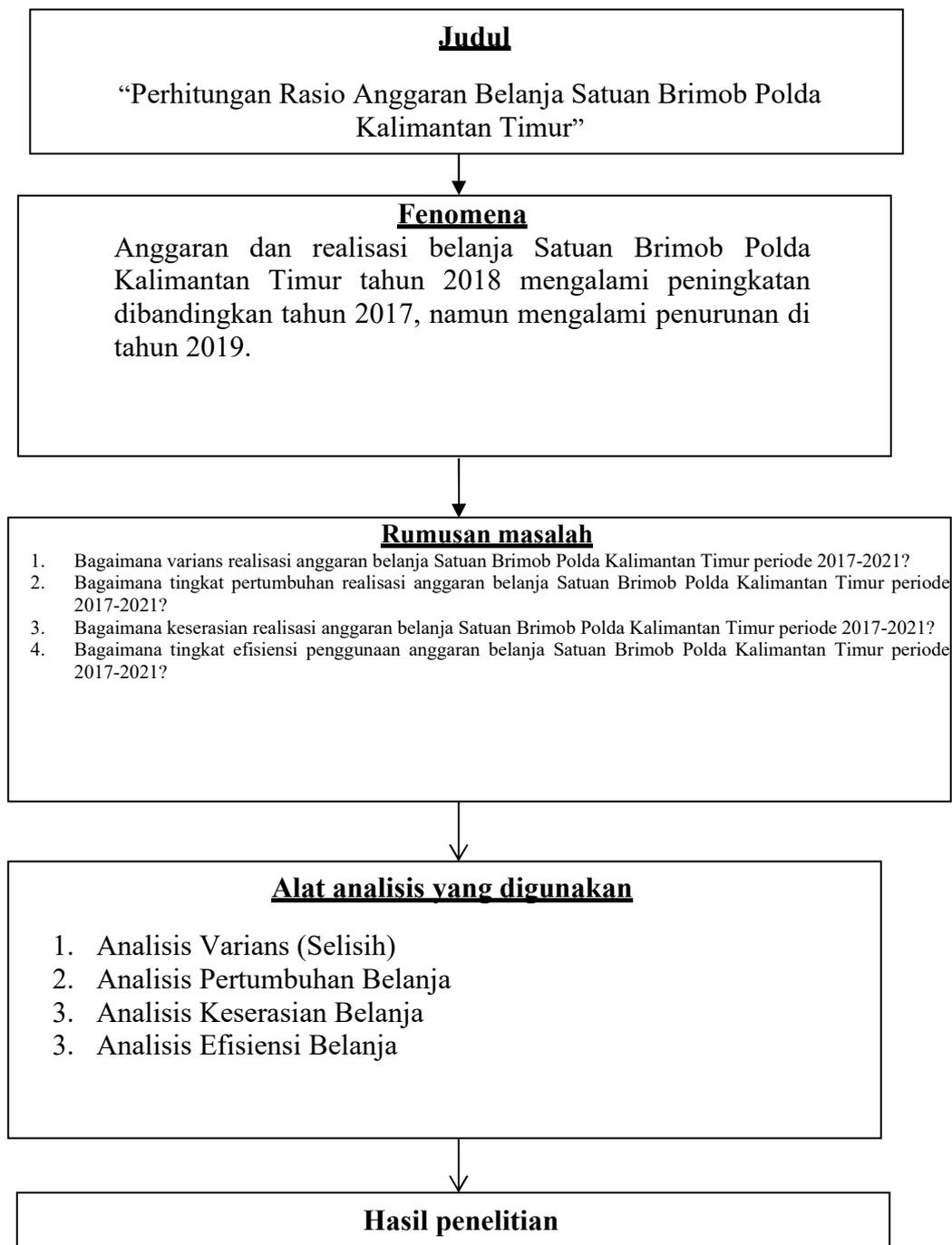
**Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu**

No	Nama / Tahun	Judul	Alat Analisis	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	Dimas Murdani Pridesma Putra (2018) / Skripsi STIE Muhamma diyah Samarinda	Analisis Kinerja Keuangan Pada Biro Umum Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2012 – 2016	Efisiensi Pertumbuhan pendapatan, belanja modal dan belanja operasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) pada Biro Umum Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2012 – 2016 memiliki nilai lebih dari 100% yang berarti tidak efisien.</li> <li>Rasio pertumbuhan (R) pada Biro Umum Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2012 – 2016 berdasarkan PAD, belanja modal dan belanja operasi mengalami fluktuasi.</li> </ol>	<p>Persamaan : menganalisis efisiensi dan pertumbuhan belanjadi lembaga</p> <p>Perbedaan : penelitian yang dilakukan ini juga meneliti tentang efektifitas, varians dan trend</p>
2	Dahlia Dico (2014) / Jurnal EMBA Vol 2 No 2	Analisis Pengelolaan dan pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Bidang Keuangan Polda Sulawesi Utara	Pengelolaan dan pelaporan keuangan berdasarkan PP No.71 Tahun 2010	Pengelolaan dan pelaporan keuangan telah dijalankan dengan baik, dapat dilihat dari transaksi yang terjadi dimulai dengan perencanaan penarikan dana sampai dana itu dapat dicairkan berdasarkan tugas dari masing-masing pejabat pengelola keuangan Negara dan pelaporan	<p>Persamaan : menganalisis laporan keuangan di kepolisian</p> <p>Perbedaan : penelitian terdahulu mengenai pengelolaan dan pelaporan keuangan berdasarkan PP No.71 Tahun 2010, sedangkan penelitian ini</p>

				keuangannya sudah sesuai dengan SAP yaitu PP No.71 Tahun 2010, dimana telah menghasilkan tiga bentuk laporan keuangan.	menilai efisiensi, efektifitas, pertumbuhan, varians dan trend
3	Marsia Sindi (2019) / Jurnal Agregat Vol 4 No 1	Analisis Kinerja Keuangan di Desa Lendung Sari	Kemandirian, efektifitas, efisiensi dan pertumbuhan	Kemandirian Desa Landungsari tahun 2016-2017 masih rendah sekali, efektifitas desa sudah efektif, efisiensi desa sudah sangat efisien dan tingkat pertumbuhan tahun 2017 mengalami peningkatan.	Persamaan : menganalisis efisiensi dan efektifitas  Perbedaan : tidak menelitian kemandirian dan efektifitas

Sumber : Hasil olah data

## 2.5 Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Definisi Operasional**

Definisi berdasarkan operasional yang akan dikemukakan pada variabel yang digunakan pada penelitian Perhitungan Rasio Anggaran Belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang, yaitu periode 2017-2021.
2. Target anggaran belanja merupakan rencana keuangan tahunan Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021 yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan selama satu tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutupi keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus.
3. Realisasi anggaran belanja merupakan anggaran belanja yang diterima Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021 dalam melaksanakan kegiatan selama satu tahun.
4. Analisis perhitungan rasio anggaran belanja adalah usaha untuk mengidentifikasi hasil capaian dari pengelolaan keuangan berdasarkan laporan

realisasi anggaran belanja yang tersedia di Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur tahun 2017-2021.

5. Varians realisasi anggaran belanja merupakan selisih antara realisasi belanja dengan yang dianggarkan Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021.
6. Tingkat pertumbuhan merupakan seberapa besar kemampuan Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya realisasi anggaran belanja periode 2017-2021.
7. Tingkat keserasian merupakan untuk mengetahui keseimbangan antarbelanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021.
8. Tingkat efisiensi merupakan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021.

### **3.2 Rincian Data Yang Diperlukan**

Rincian data diperlukan dalam rangka analisis efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur adalah:

1. Gambaran umum Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur.
2. Struktur Organisasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur.
3. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur tahun 2017-2021.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Untuk jenis penelitian ini menggunakan data sekunder, yang mana merupakan data Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Brimob Polda

Kalimantan Timur. Untuk sumber data sekunder didapatkan dari data yang dipublikasikan Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur tahun 2017-2021.

### **3.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian yang dilakukan melingkupi analisis efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021.

### **3.5 Metode Pengumpulan Data**

Teknik mengumpulkan data meliputi :

#### **1. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*)**

Dalam memperoleh data dengan tahap peneliti ke lapangan mendatangi instansi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur untuk memperoleh data Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021 dan melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Badan Pengelolaan Keuangan di Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur.

#### **2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan serta jurnal yang berkaitan dengan analisis efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja berupa buku penunjang dan jurnal-jurnal penelitian terdahulu.

### **3.6 Alat Analisis**

Untuk menjawab hasil penelitian, dilakukan analisis data dengan alat analisis efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur adalah:

## 1. Analisis Varians (Selisih) Anggaran Belanja

Analisis varians anggaran belanja merupakan analisis terhadap penelitian atau selisih antara realisasi belanja dengan yang dianggarkan. Analisis varians anggaran belanja dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi belanja dengan yang dianggarkan. Untuk menghitung besarnya selisih anggaran terhadap realisasi dapat menggunakan tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.1. Analisis Varians (Selisih) Anggaran Belanja**

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih	
			Rp	%
2017				
2018				
2019				
2020				
2021				

Sumber : Mahmudi (2016:45)

Varians belanja menurut Mahmudi (2016:45) dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

## 2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja merupakan analisis terhadap tingkat pertumbuhan realisasi anggaran belanja selama beberapa periode anggaran. Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ketahum. Pertumbuhan belanja menurut Mahmudi (2016:35) dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}_{Th\ t} - \text{Realisasi Belanja}_{Th\ t-1}}{\text{Realisasi Belanja}_{Th\ t-1}} \times 100\%$$

### 3. Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja untuk mengetahui keseimbangan antarbelanja (Mahmudi, 2016:162-164). Pada penelitian ini dilihat dari analisis belanja operasi terhadap total belanja dan analisis belanja modal terhadap total belanja, yang dijelaskan berikut ini (Mahmudi, 2016:162-164).

#### a. Analisis belanja operasi terhadap total belanja

Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi.

$$\text{Rasio Belanja Operasi Thd Total Belanja} = \frac{\text{Rasio Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

#### b. Analisis belanja modal terhadap total belanja

Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah.

$$\text{Rasio Belanja Modal Thd Total Belanja} = \frac{\text{Rasio Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

### 4. Analisis Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja menurut Mahmudi (2016:39) dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

**Tabel 3.2. Kriteria Efisiensi**

<b>Kriteria Efisiensi</b>	<b>Persentase Efisiensi</b>
Tidak efisien	100% ke atas
Efisien berimbang	100%
Efisien	Kurang dari 100%

Sumber : Mahsun (2017:187)

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Tempat Penelitian**

Objek penelitian ini Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 31 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur 76114. Visi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur yaitu terwujudnya postur Brimob yang professional dengan mengedepankan kemitraan bersama masyarakat, sinergi professional yang proaktif dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memelihara keamanan dalam negeri.

Misi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur untuk mewujudkan visi tersebut selanjutnya diuraikan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur secara optimal guna meningkatkan profesionalisme, kompetensi dan kapabilitas kinerja serta remunerasi personel Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur yang proposional.
2. Meningkatkan kemampuan dan professional personil Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur secara terus menerus melakukan pelatihan-pelatihan baik perorangan maupun satuan di tingkat datasemen, kompi dan pleton agar tetap terpelihara disiplin, loyalitas, hierarki maupun kemampuan manajerial secara berlapis dan berjenjang dalam menanggulangi gangguan kamdagri berkadar tinggi.

3. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan penempatan personil Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur dalam jabatan dengan mempedomani pembinaan karir yang berprinsip merit system, achievement, serta reward and punishment yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), transparan, akuntabel dan humanis.
4. Melaksanakan tugas operasional Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur sebagai fungsi utama Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur dalam penanggulangan gangguan kamdagri berkadar tinggi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta mengedepankan sinergitas polisional kemitraan yang proaktif untuk mendukung terciptanya situasi kamdagri yang kondusif.
5. Meningkatkan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan kemanusiaan dalam program community policing dengan mengaktualisasi kepekaan yang tinggi terhadap masalah-masalah kemanusiaan dan lingkungan.
6. Membangun zona intergritas (ZI) di jajaran Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur sebagai upaya mempercepat pencapaian program reformasi birokrasi polri (RBP) guna dapat mewujudkan organisasi polri yang handal (strive for excellence) dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
7. Memperkuat sinergitas polisional jajaran Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur bersama para pemangku kepentingan (stakeholder) dan seluruh komponen masyarakat untuk dapat bersama-sama mendukung terpeliharanya kamdagri yang kondusif.
8. Peningkatan pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana di jajaran Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur dengan melakukan inovasi-inovasi

melalui pengkajian almatsus brimob yang disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan tugas.

Dalam melaksanakan tugas Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan tugas operasional Brimob meliputi tugas Gegana dan Pelopor dalam rangka Operasi Kepolisian, Penanganan senjata kimia, biologi dan radioaktif (KBR) termasuk bantuan teknis dan kekuatan (back up) sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pelaksanaan fungsinya.

Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur menyelenggarakan kegiatan Dukungan Teknis Manajemen Penanggulangan Keamanan Dalam Negeri (Output) antara lain :

Tahun 2017 meliputi antara lain :

1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Komponen Input)
2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Komponen Input)
3. Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (Komponen Input)

Tahun 2018 meliputi antara lain :

1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Komponen Input)
2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (Komponen Input)

Tahun 2019 meliputi antara lain :

1. Dukungan Teknis Manajemen Penanggulangan Keamanan Dalam Negeri (Output) meliputi antara lain :
  - a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Komponen Input);

- b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (Komponen Input); dan
  - c. Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (Komponen Input)
2. Penanggulangan Keamanan dalam Negeri (Output) meliputi antara lain :  
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (Komponen Input).

Tahun 2020 meliputi antara lain :

- 1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Komponen Input);
- 2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (Komponen Input); dan
- 3. Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (Komponen Input)

Tahun 2021 meliputi antara lain :

- 1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Komponen Input);
- 2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (Komponen Input); dan
- 3. Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (Komponen Input)

Terselenggaranya tersebut di atas, proses, perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kegiatan operasional pemeliharaan perkantoran dapat lebih transparan dan kredibel. Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah seluruh Personil Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur.

Dasar hukum berupa :

- 1. Peraturan Menkeu Nomor : 94/PMK.02/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Petunjuk penyusunan dan penelaahan Rencana kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga TA 2014;

2. Peraturan Menkeu Nomor : 142/PMK.02/2018 tanggal 29 Oktober 2018 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
3. Peraturan Menkeu Nomor : 208/PMK.02/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
4. Rencana Kerja Satuan Brimob Polda Kaltim TA 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018, tanggal 21 September 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;

#### 4.2. Hasil Penelitian dan Analisis

Berikut data anggaran dan realisasi belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur tahun 2017-2021.

**Tabel 4.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur Tahun 2017-2021**

<b>Tahun 2017</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
Belanja Pegawai	91.081.057.000	91.081.057.000	100
Belanja Modal	2.195.571.000	2.195.571.000	100
Total	93.276.628.000	93.276.628.000	100
<b>Tahun 2018</b>			
Belanja Pegawai	87.876.770.000	85.215.332.000	96,97
Belanja Modal	2.162.571.000	2.162.571.000	100
Total	90.039.341.000	87.377.903.000	97,04
<b>Tahun 2019</b>			
Belanja Pegawai	81.059.483.000	78.564.139.000	96,92
Belanja Modal	2.162.571.000	2.162.571.000	100
Total	83.222.054.000	80.726.710.000	97
<b>Tahun 2020</b>			
Belanja Pegawai	72.898.893.000	72.797.152.000	99,87
Belanja Modal	4.096.763.000	4.096.763.000	100
Total	76.995.656.000	76.893.915.000	99,87
<b>Tahun 2021</b>			
Belanja Pegawai	73.464.948.000	73.464.948.000	100
Belanja Modal	7.605.950.000	7.605.950.000	100
Total	81.070.898.000	81.070.898.000	100

Sumber : Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur, 2016-2021

Berdasarkan tabel 4.1. diketahui bahwa pada tahun 2017 realisasi belanja sesuai dengan anggaran sebesar Rp 93.276.628.000 (100%). Tahun 2018 realisasi belanja Rp87.377.903.000 (97,04%) dengan anggaran sebesar Rp90.039.341.000. Tahun 2019 realisasi belanja Rp80.726.710.000 (97%) dengan anggaran sebesar Rp83.222.054.000. Tahun 2020 realisasi belanja Rp76.893.915.000 (99,87%) dengan anggaran sebesar Rp76.995.656.000. Tahun 2021 realisasi belanja sesuai dengan anggaran sebesar Rp81.070.898.000 (100%).

Selanjutnya dilakukan analisis tingkat pertumbuhan, tingkat efektifitas, tingkat efisiensi dan varians realisasi anggaran belanja dengan periode 2017-2021, kemudian dilakukan prediksi realisasi anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode tahun 2022-2026, yang dijelaskan sebagai berikut:

#### **4.2.1. Varians realisasi anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021.**

Berikut data varians realisasi anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021.

**Tabel 4.2. Varians realisasi anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Target Anggaran Belanja (Rp)</b>	<b>Realisasi Anggaran Belanja (Rp)</b>	<b>Selisih (Rp)</b>
1	2017	93.276.628.000	93.276.628.000	0
2	2018	90.039.341.000	87.377.903.000	-2.661.438.000
3	2019	83.222.054.000	80.726.710.000	-2.495.344.000
4	2020	76.995.656.000	76.893.915.000	-101.741.000
5	2021	81.070.898.000	81.070.898.000	0

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa varians realisasi anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 varians realisasi anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur sebesar Rp0 artinya tidak ada selisih dari target anggaran belanja Rp93.276.628.000 dan realisasi Rp93.276.628.000. Tahun 2018 varians realisasi anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur sebesar Rp - 2.661.438.000 yang mana realisasi belanja lebih kecil dibandingkan target anggaran belanja Rp90.039.341.000 dan realisasi Rp87.377.903.000. Tahun 2019

varians realisasi anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur sebesar Rp -2.495.344.000 yang mana realisasi belanja lebih kecil dibandingkan target anggaran belanja Rp83.222.054,000 dan realisasi Rp80.726.710.000. Tahun 2020 varians realisasi anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur sebesar Rp -101.741.000 yang mana realisasi belanja lebih kecil dibandingkan target anggaran belanja Rp76.995.656.000 dan realisasi Rp76.893.915.000. Sedangkan tahun 2021 varians realisasi anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur sebesar Rp0 artinya tidak ada selisih dari target anggaran belanja Rp81.070.898.000 dan realisasi Rp 81.070.898.000.

#### **4.2.2. Tingkat pertumbuhan realisasi anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021.**

Berikut data hasil perhitungan tingkat pertumbuhan realisasi anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021.

**Tabel 4.3. Pertumbuhan realisasi anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Anggaran Belanja (Rp)</b>	<b>Pertumbuhan (%)</b>	<b>Kriteria</b>
1	2016	88.454.226.332	-	-
2	2017	93.276.628.000	5,17%	Naik
3	2018	87.377.903.000	-6,32	Turun
4	2019	80.726.710.000	-7,61	Turun
5	2020	76.893.915.000	-4,75	Naik
6	2021	81.070.898.000	5,43	Naik

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa pertumbuhan realisasi anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021 mengalami fluktuasi yakni tahun 2017 realisasi anggaran belanja Rp93.276.628.000 dengan

pertumbuhan 5,17% dari tahun 2016 realisasi anggaran belanja Rp88.454.226.332 sehingga mengalami peningkatan. Untuk tahun 2018 realisasi anggaran belanja Rp87.377.903.000 dengan pertumbuhan -6,32% dari tahun 2017 sehingga mengalami penurunan. Begitupula tahun 2019 realisasi anggaran belanja Rp80.726.710.000 dengan pertumbuhan -7,61% dari tahun 2018 sehingga mengalami penurunan. Sedangkan tahun 2020 realisasi anggaran belanja Rp76.893.915.000 dengan pertumbuhan -4,75% dari tahun 2019 sehingga mengalami peningkatan walaupun masih kurang dari anggaran. Tahun 2021 realisasi anggaran belanja Rp81.070.898.000 dengan pertumbuhan 5,43% dari tahun 2020 sehingga mengalami peningkatan.

#### **4.2.3. Keserasian realisasi anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021**

##### **1. Analisis belanja operasi terhadap total belanja**

Berikut data hasil perhitungan keserasian realisasi anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021 berdasarkan analisis belanja operasi terhadap total belanja.

**Tabel 4.4. Keserasian realisasi anggaran belanja berdasarkan analisis belanja operasi terhadap total belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Belanja Operasi (Rp)</b>	<b>Total Belanja (Rp)</b>	<b>Keserasian (%)</b>	<b>Kriteria</b>
1	2017	91.081.057.000	93.276.628.000	97,7	-
2	2018	85.215.332.000	87.377.903.000	97,5	Turun
3	2019	78.564.139.000	80.726.710.000	97,3	Turun
4	2020	72.797.152.000	76.893.915.000	94,7	Turun
5	2021	73.464.948.000	81.070.898.000	90,6	Turun

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa keserasian realisasi anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021 berdasarkan analisis belanja operasi terhadap total belanja terus mengalami penurunan yakni pada tahun 2017 sebesar 97,7%, tahun 2018 menjadi 97,5%, tahun 2019 menjadi 97,3%, tahun 2020 menjadi 94,7% dan tahun 2021 menjadi 90,6%.

## 2. Analisis belanja modal terhadap total belanja

Berikut data hasil perhitungan keserasian realisasi anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021 berdasarkan analisis belanja modal terhadap total belanja.

**Tabel 4.5. Keserasian realisasi anggaran belanja berdasarkan analisis belanja modal terhadap total belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021**

No	Tahun	Belanja Modal (Rp)	Total Belanja (Rp)	Keserasian (%)	Kriteria
1	2017	2.195.571.000	93.276.628.000	2,35	-
2	2018	2.162.571.000	87.377.903.000	2,48	Naik
3	2019	2.162.571.000	80.726.710.000	2,68	Naik
4	2020	4.096.763.000	76.893.915.000	5,33	Naik
5	2021	7.605.950.000	81.070.898.000	9,38	Naik

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa keserasian realisasi anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021 berdasarkan analisis belanja modal terhadap total belanja terus mengalami peningkatan yakni pada tahun 2017 sebesar 2,35%, tahun 2018 menjadi 2,48%, tahun 2019 menjadi 2,68%, tahun 2020 menjadi 5,33% dan tahun 2021 menjadi 9,38%.

### 4.2.4. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021.

Berikut data hasil perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021.

**Tabel 4.6. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021**

No	Tahun	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja Langsung (Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria
1	2017	93.276.628.000	2.195.571.000	2,35	Efisien
2	2018	87.377.903.000	2.162.571.000	2,48	Efisien
3	2019	80.726.710.000	2.162.571.000	2,68	Efisien
4	2020	76.893.915.000	4.096.763.000	5,33	Efisien
5	2021	81.070.898.000	7.605.950.000	9,38	Efisien

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa efisiensi penggunaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 efisiensi penggunaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur sebesar 2,35% artinya efisien dari realisasi anggaran belanja langsung Rp2.195.571.000 dan realisasi anggaran belanja Rp93.276.628.000. Pada tahun 2018 efisiensi penggunaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur sebesar 2,48% artinya efisien dari realisasi anggaran belanja langsung Rp2.162.571.000 dan realisasi anggaran belanja Rp87.377.903.000. Pada tahun 2019 efisiensi penggunaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur sebesar 2,68% artinya efisien dari realisasi anggaran belanja langsung Rp2.162.571.000 dan realisasi anggaran belanja Rp80.726.710.000. Pada tahun 2020 efisiensi penggunaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur sebesar 5,33% artinya efisien

dari realisasi anggaran belanja langsung Rp4.096.763.000 dan realisasi anggaran belanja Rp76.893.915.000. Pada tahun 2021 efisiensi penggunaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur sebesar 9,38% artinya efisien dari realisasi anggaran belanja langsung Rp7.605.950.000 dan realisasi anggaran belanja Rp81.070.898.000.

### **4.3. Pembahasan**

#### **4.3.1. Varians realisasi anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021.**

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa varians realisasi anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 varians realisasi anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur sebesar Rp0 artinya tidak ada selisih dari target anggaran belanja Rp93.276.628.000 dan realisasi Rp93.276.628.000. Tahun 2018 varians realisasi anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur sebesar Rp - 2.661.438.000 yang mana realisasi belanja lebih kecil dibandingkan target anggaran belanja Rp90.039.341.000 dan realisasi Rp87.377.903.000. Tahun 2019 varians realisasi anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur sebesar Rp -2.495.344.000 yang mana realisasi belanja lebih kecil dibandingkan target anggaran belanja Rp83.222.054,000 dan realisasi Rp80.726.710.000. Tahun 2020 varians realisasi anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur sebesar Rp -101.741.000 yang mana realisasi belanja lebih kecil dibandingkan target anggaran belanja Rp76.995.656.000 dan realisasi Rp76.893.915.000.

Sedangkan tahun 2021 varians realisasi anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur sebesar Rp0 artinya tidak ada selisih dari target anggaran belanja Rp81.070.898.000 dan realisasi Rp 81.070.898.000.

Analisis varians anggaran belanja merupakan analisis terhadap penelitian atau selisih antara realisasi belanja dengan yang dianggarkan. Analisis varians anggaran belanja dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi belanja dengan yang dianggarkan. Selisih realisasi belanja dengan yang dianggarkan yang cukup signifikan bisa memberikan dua kemungkinan, yang pertama menunjukkan adanya efisiensi anggaran dan kedua jika terjadi selisih kurang maka sangat mungkin telah terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga estimasi belanja kurang tepat, atau tidak terserapnya anggaran tersebut bisa jadi disebabkan karena ada program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan eksekutif padahal sudah diamanatkan dalam anggaran.

Selisih yang terjadi pada realisasi anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2018 dikarenakan lebih tingginya target belanja pegawai dibandingkan realisasi, walaupun belanja barang memiliki nilai yang tetap antara target dengan realisasi. Begitupula tahun 2019 dan 2020 lebih tingginya target belanja pegawai dibandingkan realisasi, walaupun belanja barang memiliki nilai yang tetap antara target dengan realisasi.

Penyebab selisih atau anggaran yang dibuat akan mengalami kegagalan bila hal-hal berikut ini tidak diperhatikan pembuatan anggaran tidak cakap, tidak mampu berpikir ke depan, dan tidak memiliki wawasan yang luas, wewenang dalam membuat anggaran tidak tegas dan dana tidak cukup.

#### **4.3.2. Tingkat pertumbuhan realisasi anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021.**

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pertumbuhan realisasi anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021 mengalami fluktuasi yakni tahun 2017 realisasi anggaran belanja Rp93.276.628.000 dengan pertumbuhan 5,17% dari tahun 2016 realisasi anggaran belanja Rp88.701.769.392 sehingga mengalami peningkatan. Untuk tahun 2018 realisasi anggaran belanja Rp87.377.903.000 dengan pertumbuhan -6,32% dari tahun 2017 sehingga mengalami penurunan. Begitupula tahun 2019 realisasi anggaran belanja Rp80.726.710.000 dengan pertumbuhan -7,61% dari tahun 2018 sehingga mengalami penurunan. Sedangkan tahun 2020 realisasi anggaran belanja Rp76.893.915.000 dengan pertumbuhan -4,75% dari tahun 2019 sehingga mengalami peningkatan walaupun masih kurang dari anggaran. Tahun 2021 realisasi anggaran belanja Rp81.070.898.000 dengan pertumbuhan 5,43% dari tahun 2020 sehingga mengalami peningkatan.

Hasil penelitian ini didukung penelitian Putra (2018) menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan (R) pada Biro Umum Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2012 – 2016 berdasarkan PAD, belanja modal dan belanja operasi mengalami fluktuasi.

Peningkatan atau naiknya pertumbuhan realisasi anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur tahun 2017 dikarenakan terjadinya peningkatan

belanja pegawai walaupun belanja barang mengalami penurunan. Penurunan pertumbuhan realisasi anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur tahun 2018 dan tahun 2019 dikarenakan belanja pegawai terus mengalami penurunan, sedangkan belanja barang tidak mengalami perubahan. Peningkatan atau naiknya pertumbuhan realisasi anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur tahun 2020 dan 2021 dikarenakan terjadinya peningkatan belanja barang, sedangkan belanja pegawai di tahun 2020 terjadi penurunan dan meningkat kembali di tahun 2021.

Tiga faktor yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan realisasi anggaran belanja, yakni peningkatan kebutuhan terhadap layanan pemerintah dari masyarakat penerima layanan; peningkatan penyediaan (*supply*) layanan pemerintah dari para penerima layanan; dan meningkatnya ketidakefisienan pemberian pelayanan.

Terjadi penurunan realisasi anggaran yang cukup signifikan yang terjadi mulai dari bulan Maret sampai dengan Mei 2020, khususnya pada jenis belanja barang. Lebih lanjut, ada 2 faktor utama yang menyebabkan penurunan realisasi anggaran pada belanja barang. Pertama, menurunnya belanja barang pada *output* teknis (bidang/bidang) khususnya anggaran perjalanan dinas. Kedua, menurunnya belanja barang pada *output* layanan operasional (perkantoran). Diberlakukannya WFH bagi sebagian besar pegawai menyebabkan biaya operasional seperti belanja bahan bakar minyak, keperluan kantor, alat tulis kantor, perjalanan dinas dan biaya operasional lainnya menurun drastis. Dengan demikian, banyak kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi yang sudah dijadwalkan selama 1 tahun ke depan

terpaksa harus ditunda atau dibatalkan dengan pertimbangan keamanan dan kesehatan.

#### **4.3.3. Keserasian realisasi anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021.**

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa keserasian realisasi anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021 berdasarkan analisis belanja operasi terhadap total belanja terus mengalami penurunan yakni pada tahun 2017 sebesar 97,7%, tahun 2018 menjadi 97,5%, tahun 2019 menjadi 97,3%, tahun 2020 menjadi 94,7% dan tahun 2021 menjadi 90,6%. Adapun keserasian realisasi anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021 berdasarkan analisis belanja modal terhadap total belanja. terus mengalami peningkatan yakni pada tahun 2017 sebesar 2,35%, tahun 2018 menjadi 2,48%, tahun 2019 menjadi 2,68%, tahun 2020 menjadi 5,33% dan tahun 2021 menjadi 9,38%.

Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Berbeda dengan belanja operasi yang bersifat jangka pendek dan rutin, pengeluaran belanja modal yang dilakukan saat ini akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang. Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah adalah antara 5-20%.

Berdasarkan keserasian realisasi anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021 berdasarkan analisis belanja modal terhadap total belanja pada tahun tahun 2017-2019 masih belum sesuai standar antara 5-20%. Tidak terealisasinya anggaran ini disebabkan oleh beberapa faktor penyebab diantaranya lemahnya perencanaan yang sering memakan waktu lama dan menyebabkan keterlambatan pada pengesahannya menjadikan target realisasi anggaran tidak tercapai.

#### **4.3.4. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021.**

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa efisiensi penggunaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 efisiensi penggunaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur sebesar 2,35% artinya efisien dari realisasi anggaran belanja langsung Rp2.195.571.000 dan realisasi anggaran belanja Rp93.276.628.000. Pada tahun 2018 efisiensi penggunaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur sebesar 2,48% artinya efisien dari realisasi anggaran belanja langsung Rp2.162.571.000 dan realisasi anggaran belanja Rp87.377.903.000. Pada tahun 2019 efisiensi penggunaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur sebesar 2,68% artinya efisien dari realisasi anggaran belanja langsung Rp2.162.571.000 dan realisasi anggaran belanja Rp80.726.710.000. Pada tahun 2020 efisiensi penggunaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur sebesar 5,33% artinya efisien dari realisasi anggaran belanja langsung Rp4.096.763.000 dan realisasi anggaran

belanja Rp76.893.915.000. Pada tahun 2021 efisiensi penggunaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur sebesar 9,38% artinya efisien dari realisasi anggaran belanja langsung Rp7.605.950.000 dan realisasi anggaran belanja Rp81.070.898.000.

Hasil penelitian ini didukung penelitian Sindi (2019) menunjukkan bahwa rasio belanja Desa Landungsari tahun 2016-2017 sudah efisien.

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Berdasarkan rata-rata tingkat efisiensi penggunaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021 diperoleh 4,44% sehingga dapat dikatakan efisien. Maka penggunaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021 yakni menunjukkan sudah efisien. Penyebab kasus-kasus perubahan anggaran keuangan pada umumnya terjadi diakibatkan karena pengadaan barang/jasa yang melebihi kebutuhan atau tidak sesuai dengan standar dan adanya pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga pada saat penyusunan anggaran (APBN).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis dan pembahasan mengenai Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Varians realisasi anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur tahun 2017 tidak ada selisih, tahun 2018 sebesar Rp -2,661,438,000, tahun 2019 sebesar Rp -2,495,344,000, tahun 2020 sebesar Rp -101,741,00, dan tahun 2021 tidak ada selisih antara target anggaran belanja dengan realisasi belanja.
2. Pertumbuhan realisasi anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021 mengalami fluktuasi yakni tahun 2017 sebesar 5,17%, tahun 2018 sebesar -6,32%, tahun 2019 menurun -7,61%, tahun 2020 meningkat -4,75% dan tahun 2021 meningkat 5,43%.
3. Keserasian realisasi anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021 berdasarkan analisis belanja operasi terhadap total belanja terus mengalami penurunan yakni pada tahun 2017 sebesar 97,7%, tahun 2018 menjadi 97,5%, tahun 2019 menjadi 97,3%, tahun 2020 menjadi 94,7% dan

tahun 2021 menjadi 90,6%, sedangkan berdasarkan analisis belanja modal terhadap total belanja terus mengalami peningkatan yakni pada tahun 2017 sebesar 2,35%, tahun 2018 menjadi 2,48%, tahun 2019 menjadi 2,68%, tahun 2020 menjadi 5,33% dan tahun 2021 menjadi 9,38%.

4. Efisiensi penggunaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur tahun 2017 sebesar 2,35% artinya efisien, tahun 2018 sebesar 2,48% artinya efisien, tahun 2019 sebesar 2,68% artinya efisien, tahun 2020 sebesar 5,33% artinya efisien dan tahun 2021 sebesar 9,38% artinya efisien.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur agar semakin meningkatkan kinerja dalam pengelolaan Anggaran Belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur secara umum. Dengan kinerja yang baik maka efektifitas dan efisiensi belanja juga akan semakin baik.
2. Periode penelitian ini terbatas untuk tahun 2017-2021, diharapkan penelitian selanjutnya menambahkan periode tahun penelitian agar lebih akurat dalam menganalisis pengelolaan Anggaran Belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustina, Fitriyah. 2013. *Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang.
- Dahlia, Dico. 2014. *Analisis Pengelolaan dan pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Bidang Keuangan Polda Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA Vol 2 No 2
- Dimas, Murdani Pridesma Putra. 2018. *Analisis Kinerja Keuangan Pada Biro Umum Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2012 – 2016*. Skripsi STIE Muhammadiyah Samarinda
- Halim, Abdul. 2016. *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Jilid 1. Edisi Kelima. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohammad. 2017. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE.
- Mardiasmo. 2018. *Efisiensi dan Efektifitas*. Jakarta: Andy.
- Needles, Belverd E. et. al. 2014. *Financial and Managerial Accounting*. New York : Routledge
- Sindi, Marsia. 2019. *Analisis Kinerja Keuangan di Desa Lendung Sari*. Jurnal Program Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tungadewi.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UUD Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah

